

RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025 – 2029

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berlandaskan pada visi dan misi Kabupaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada saudara-saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan merumuskan kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Renstra.

Kuala Tungkal, Mei 2025

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



APRI DASMAN, S. ST, MT
NIP. 19730405 199303 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	7
2.2 TUGAS,FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD	7
2.3 SUMBER DAYA SKPD	14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.....	25
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	27
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN PU PERA DAN RENSTRA PROVINSI.....	30
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	32
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	34
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	50
BAB VII PENUTUP	52





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jendral TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang sering disebut dengan ***Asta cita***, salah satunya yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana program utama adalah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepenuhnya akan mendukung program pemerintah sebagaimana tersebut di atas, di samping itu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan Infrastruktur dasar, Sarana dan Prasarana Publik melalui Bidang Bina Marga , Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Jasa konstruksi dan Bidang Penataan ruang dan Bagian Sekretariat. Dalam menjalankan peran strategisnya ini SKPD berpedoman kepada Rencana Strategis. Rencana Strategis SKPD selanjutnya disingkat Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM



Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKDP disusun berpedoman pada RPJMD, dalam hal ini adalah RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih. Renstra SKPD memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan RPJMD dimana komponen-komponen dalam RPJMD mempedomani rumusan komponen-komponen di dalam Renstra SKPD.

Untuk hirarki di bawahnya Renstra SKPD akan mempedomani Renja-SKPD dimana Renja SKPD akan mengadopsi komponen-komponen yang terkandung di dalam Renstra SKPD yaitu isu strategis, visi, misi, strategi, arah kebijakan serta tujuan dan sasaran. Kegiatan-kegiatan pada Renja SKPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024.
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2020 Tentang rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033
16. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur dasar, sarana dan prasarana publik di bidang ke-PU-an.
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 adalah:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- A. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 adalah:

Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi, dan.



5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Merumuskan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.



- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jasa konstruksi

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang sumber daya air.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi dan rawa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan saluran sungai dan drainase primer;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan



sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;

- e. Melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah dan permukaan;
- f. Pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala Kabupaten;
- g. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, falisitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja terampil jasa konstruksi, pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Bina Marga

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang bina marga.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan peralatan laboratorium, penyewaan alat berat, dan pengujian laboratorium atas tanah, beton dan aspal;



- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, falisitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan rutin, berkala jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan survey untuk mengetahui kondisi jalan kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan gtugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang cipta karya
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya, serta pendataan sarana dan prasarana keciptakaryaan.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, air minum pembangunan sistem penyediaan air minum, dan meningkatkan cakupan pelaksanaan air minum berbasis masyarakat.



- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Tata Bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penataan Ruang

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan tata ruang, menyiapkan dokumen RDTR pada setiap kawasan strategis kabupaten;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, strategi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja terampil jasa konstruksi, pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;



- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

- a. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan program

3. Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi:

- a. Seksi Bina Irigasi dan Rawa
- b. Seksi Saluran Sungai dan Drainase Primer
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- d. Seksi Jasa Konstruksi

4. Bidang Bina Marga

- a. Seksi Peralatan dan laboratorium
- b. Seksi Jalan dan jembatan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan



5. Bidang Cipta Karya

- a. Seksi perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya.
- b. Seksi pengembangan air minum
- c. Seksi Penyehatan lingkungan, permukiman dan tata bangunan.

6. Bidang Penataan Ruang

- a. Seksi Pembinaan Tata Ruang
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang

2.2. Sumber Daya SKPD

Komposisi dan Tingkat Pendidikan Aparatur

1. Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum ada 110 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 50 orang
- Pegawai TKS/TKK (honorar) sebanyak: 60 orang

Adapun kebutuhan ideal pejabat struktural adalah:

1. Pejabat eselon 2 1 Orang
2. Pejabat Eselon 3 5 Orang
3. Pejabat Eselon 4 14 Orang.
4. Apa bila 1 Pejabat eselon 4 memiliki 2 orang staf, maka kebutuhan staf 28 orang.



5. Jabatan fungsional Bendahara 1 orang

Maka kebutuhan Jumlah ASN yang ideal sebanyak 50 orang.

6. Pendidikan terakhir aparatur

- a. Strata 2 (dua) sebanyak : 3 orang
- b. Strata 1 (satu) sebanyak : 20 orang
- c. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 4 orang
- d. SMA sederajat sebanyak : 23 orang

7. Pendidikan terakhir honorer

- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 18 orang
- b. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 4 orang
- c. SMA sederajat sebanyak : 50 orang

Kondisi Aset

Untuk menunjang operasional pelaksanaan program dan kegiatan akumulasi nilai aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut.

No.	URAIAN	NILAI (Rp)
A	ASET LANCAR (Persediaan)	
B	ASET TETAP	
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin	
3.	Gedung dan Bangunan	



4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
5.	Aset Tetap Lainnya	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C	ASET LAINNYA	
D	BMD Ekstrakompatibel	

Sumber : Laporan Keuangan DPUPR Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode RPJMD 2025 – 2029 serta tertuang didalam Rentstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Sasaran :

- Tersedianya Sumber Daya Air yang mampu mendukung produktifitas peretanian dan perkenbunan yang mendukung perkembangan ekonomi daerah.
- Terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat.
- Terwujudnya konektifitas dalam daerah dan antar lintas kabupaten.

Adapun Anggaran dan realisasi Anggaran periode Tahun 2021 – 2025 berdasarkan alokasi dan realisasi berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :



TABEL 2.1
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG tahun 2016 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	URAIAN PROGRAM		ANGGARAN		BOBOT ANGGARAN	
				ALOKASI	REALISASI		
1	2	3					
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	634.305.543.202	602.738.662.092		
		2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	3.738.100.000	3.425.521.581		
2	Panjang Jalan Konektifitas Yang Terbangun	3	Peningkatan Jalan dan Penggatian Jembatan	49.880.000.000	44.402.979.637		
		4	Pembangunan Infrastrukr Perkotaan dan Perdesaan	37.612.349.606	37.103.039.275		
		5	Transportasi Perdesaan	213.732.000	6.000.000		



		6	Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan	308.642.092.098	285.663.427.892		
			PENDANAAN INDIKATOR 1 DAN 2	1.034.391.816.906	973.339.630.476	64,267 91923	60,88 92
	Persentase Kecamatan Yang Mendapatkan Aksesibilitas dan Layanan Air Bersih	7	Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	3.933.560.000	3.815.661.100		
		8	Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1.750.250.000	1.543.588.210		
		9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	138.093.844.000	133.245.441.816		
			PENDANAAN INDIKATOR 3	143.777.654.000	138.604.691.126	8,9330 66275	8,670 693
4	Berkurangnya Luasan Genangan di Perkotaan	10	Pembangunan Prasarana Sanitasi	6.556.114	6.556.114		
		11	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	295.091.000	245.192.415		
		12	Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong gorong	21.568.119.789	21.028.722.270		
			PENDANAAN INDIKATOR 4	21.869.766.903	21.280.470.799	1,3587 93051	1,331 242
5	Persentase Rekomendasi IMB di Patuhi	13	Pengendalian dan pemanfaatan ruang	443.820.000	161.287.245		
		14	Pengembangan Perumahan	174.825.000	111.420.000		
			PENDANAAN INDIKATOR 5	618.645.000	272.707.245		
6	Jumlah Kecamatan teraliri	15	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	92.085.406.579	87.320.561.333		



	air irigasi		Rawa dan Jarinhgan Pengairan Lainnya				
			PENDANAAN INDIKATOR 6	92.085.406.579	87.320.561.333	5,7213 69191	5,462 512
7	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang	1 6	Perencanaan Tata Ruang	6.377.720.000	5.917.586.312		
		1 7	Pemanfaatan Ruang	871.795.000	473.390.000		
		1 8	Pengembangan Data dan Informasi	296.350.000	280.075.000		
			PENDANAAN INDIKATOR 7	7.545.865.000	6.671.051.312	0,4688 33023	0,417 321
8	Persenta se Penyedia Jasa Konstruks i Memenuh i Standar Kualifikas i	1 9	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.131.560.000	819.570.100		
			PENDANAAN INDIKATOR 8	1.131.560.000	819.570.100	0,0703 05087	0,051 27
				-	-		
				-	-		
			JUMLAH	1.301.420.714.3 88	1.228.308.682.39 1		
				-	-		
		2 0	Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.944.245.875	6.262.266.217		
		2 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235.477.128.264	230.053.955.789		



	2	Peningkatan Disiplin Aparatur	405.845.000	387.994.000		
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.000.000	10.000.000		
	3					
	4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	638.825.000	476.435.000		
		Peningkatan Sarana Kesehatan	24.690.350.000	23.355.440.000		
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2.536.150.000	2.480.658.000		
		Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya	36.309.207.600	35.656.806.054		
		JUMLAH LAIN LAIN	308.078.751.739	298.683.555.060	19,141 27704	
		TOTAL PENDANAAN	1.609.499.466.1 27	1.598.542.202.78 6		

Dari Tabel 2.1 diatas terlihat alokasi anggaran untuk indikator kinerja utama selama periode Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

No	IKU	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1.	Persentase Jalan dan Jembatan	1.014.391.855.000,-	973.339.630.476,-	65,26



	dalam kondisi Manataf			
2	Persentase kecamatan mempunyai akses layanan air minum	143.777.654.000,-	138.604.691.126,-	8,93
3	Persentase luasan lahan pertanian yang teraliri air	92.085.406.579,-	87.320.561.333,-	5,71
4	Berkurangnya luas genangan di perkotaan	21.869.766.903,-	21.280.470.799,-	1,35
5	Persentase kesesuaian ruang	7.545.865.000,-	6.671.051.312,-	0,46

Disamping alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja utama diatas terdapat alokasi anggaran tetapi tidak merupakan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkisar Rp. 308.078.751.- dengan realisasi sebesar Rp. 298.683.555.060,- atau sekitar 19,14 %.

Dari alokasi anggaran periode Tahun 2016 – 2021 diatas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir periode RPJMD Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja OPD pada akhir period RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik dan sedang	58,00%	56,70%	97,76%
2	Berkurangnya luas genangan di perkotaan	90,00%	73,00%	81,11%
3	Persentase kecamatan mempunyai akses layanan air minum	95,00%	84,61%	89,06%
4	Prsentase Kesesuaian Ruang	80,00%	78,00%	97,05%
5	Persentase Luasan Lahan Pertanian yang teraliri air irigasi	65,00%	60,00%	92,31%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pencapaian sasar n kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama berada pada capaian diatas 75 persen. Sementara itu apabila diamati dari Tabel 2.1 terdapat alokasi anggaran yang



diperuntukan untuk Kegiatan yang tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidak berhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mampu mencapai kinerja yang sudah ditetapkan.





BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki beberapa permasalahan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

1. Sebagian Wilayah pengembangan berada di wilayah pesisir yang berawa dan bergambut yang menyebabkan permasalahan pada daya dukung tanah dasar.
2. Untuk konektifitas antar wilayah memerlukan biaya yang besar karena memiliki banyak parit.
3. Sebagian wilayah terletak jauh dari Quarry atau material.
4. Alat Berat yang dimiliki umurnya sudah relatif tua sehingga sudah diperlukan peremajaan.
5. Belum dimilikinya Laboratorium Pengujian.

b. Bidang Cipta Karya

1. Cakupan layanan air minum SPAM perpipaan masih relatif rendah.





2. Cakupan layanan sanitasi masih rendah.
3. Masih banyak terdapat bangunan yang belum memiliki IMB.
4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial dan Budaya Belum Memadai.

c. Bidang Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi

1. Aliran Air Irigasi belum maksimal mendukung peningkatan potensi pertanian.
2. Pengembangan dan pemeliharaan Daerah Rawa akan mempengaruhi perkebunan masyarakat serta lalu lintas air.
3. Pengelolaan Air Baku dan Sungai belum optimal dilakukan.
4. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi belum dapat dilakukan dengan optimal.
5. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki sertifikasi.

d. Bidang Penataan Ruang

1. Belum adanya Perda RDTR sebagai turunan dari Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Belum terlaksananya pengendalian pemanfaatan tata ruang secara optimal.





3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu visi **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, BERKAH ;(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis), MADANI ;(Mandiri dan ber-Inovasi) ”** sementara untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik;
3. Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan;

Berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029, maka setiap SKPD harus mendukung program-program prioritas tersebut dari rangkaian program sesuai urusan wajib dari SKPD terkait. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program-program untuk mewujudkan misi ketiga Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu: ***Berkah dalam Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.***

Program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)



2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.2.1 Faktor-faktor Penghambat Pelayanan SKPD antara lain adalah:

Berkaitan dengan program-program di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki faktor-faktor penghambat antara lain adalah:

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas.
2. Pelaksanaan administrasi perkantoran belum optimal
3. Peralatan kerja masih kurang.
4. Belum tersedianya unit sebagai pelaksanan pengujian bahan dan kualitas pekerjaan.
5. Pembinaan pelaksana penyedia barang dan jasa belum optimal.
6. Kurangnya Sosialisasi tata ruang di tengah masyarakat.





3.2.2 Faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD antara lain adalah:

1. Pemilihan program sesuai skala prioritas dan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat serta alokasi dana yang tersedia.
2. Usaha peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia baik di dalam organisasi maupun secara lintas sektoral untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan penerapan prinsip clean and good governance.
3. Meningkatnya kesadaran untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan.
4. Perlunya kesabaran masyarakat menanti hasil-hasil pembangunan mengingat terbatasnya kemampuan pendanaan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra PUPR Provinsi Jambi

Menelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015-2020, menyebutkan bahwa arah kebijakan Pembangunan Infrastruktur bidang pekerjaan umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan yang didukung industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Selanjutnya Strategi yang dilaksanakan adalah:



1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan antar daerah terutama di kawasan tertinggal, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis dalam rangka kemandirian.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan, konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan pekerjaan umum maka faktor-faktor penghambat dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L antara lain adalah:

1. Kesenjangan antar wilayah dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat terutama masyarakat miskin
2. Masih kurangnya efisiensi, efektivitas, produktivitas dan dukungan secara optimal oleh jajaran birokrasi serta belum mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.





3. Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pembangunan terkait dengan dukungan infrastruktur PU untuk menyokong produksi pangan.

Sedangkan faktor-faktor pendorongnya antara lain adalah:

1. Kesadaran untuk meningkatkan profesionalisme jajaran birokrasi.
2. Tersedianya dana untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur
3. Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; b. pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;





c. **perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah;**

d. perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten;

e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal;

f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;

g. **perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;**

h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan;

i. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan

j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan	- Peningkatan konektivitas dan kondisi pelayanan jaringan jalan Kabupaten. - Cakupan layanan air minum SPAM perpipaan masih rendah. - Cakupan Layanan Sanitasi Masih Rendah.	Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas	Kesadaran untuk meningkatkan profesionalisme jajaran birokrasi



2	mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersediannya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah.	Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air hampir semua tergantung dengan kondisi muka air seperti pekerjaan saluran irigasi, rawa, dan tanggul. Akibatnya saluran irigasi, rawa dan tanggul cepat mengalami kerusakan.	Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pembangunan terkait dengan dukungan infrastruktur PU untuk menyokong produksi pangan.	Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang
3.	memantapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan memantapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah	Belum adanya turunan dari Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Kurangnya Sosialisasi tata ruang di tengah masyarakat.	Meningkatnya kesadaran untuk melakukan pembangunan dengan mentaati tata ruang.
4.	mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga	Kondisi lahan yang berawa dan bergambut membutuhkan biaya yang mahal untuk pembangunan jalan dan jembatan.	Kesenjangan antar wilayah dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat terutama masyarakat miskin	Tersediannya dana untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan penelaahan terhadap faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan SKPD maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ruas jalan tol Jambi – Rengat melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan



Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban). Dengan Interchange berada di Dusun Mundo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu.

Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab. Tanjung Jabung Barat.

2. Infrastruktur pelayanan dasar belum memadai dan merata, sehingga menjadi penghambat konektivitas antar wilayah.
3. Kemantapan jalan kabupaten yang masih rendah.
4. Masih banyak terdapat idle capacity dari Cakupan pelayanan air minum.
5. Cakupan pelayanan sanitasi masih rendah untuk mendukung standar pelayanan minimal kabupaten.
6. Peningkatan infrastruktur pengelolaan Sumber daya air untuk pelayanan irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi rawa yang sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu Ketahanan Pangan dan peningkatan produksi pertanian.





Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sarana transportasi yang terkoneksi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Terpenuhinya prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan
3. Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.





Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya jalan kabupaten yang mantap
2. Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat
3. Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari
4. Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat.
5. Tersedianya Dokumen Tata ruang sebagai penunjang keteraturan pembangunan dan mendorong investasi bagi pelaku usaha

a. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan yang mantap.
2. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas.
3. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.





4. Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP, dan Menyusun rencana ketersediaan SPALD-T dan SPALD-S yang aman bagi masyarakat
2. Menyusun dokumen rencana tata ruang dan kegiatan TURBINLAKWAS Tata Ruang.
3. Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.

Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel No. 4.1** berikut :





**RENSTRA DINAS PUPR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2025 - 2029**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2025)	Target Kinerja pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)
						2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Terwujudnya sarana transportasi yang terkoneksi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan	Tersedianya jalan kabupaten yang mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	31,52%	34%	38%	42%	46%	50%	54%
2	Terpenuhinya prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan	Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	63,11%	66%	69%	72%	75%	78%	78%
3		Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	70,84%	75%	75%	78%	85%	100%	100%

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

36





**RENSTRA DINAS PUPR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2025 - 2029**

4	Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat	Terjaminnya aliran air irigasai untuk pertanian dan perkebunan rakyat	persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	%	45%	50%	55%	60%	70%	70%	70%
5	'Terwujudnya Pembangunan dan Penyediaan Ruang publik yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah	Kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW	Persentase tata ruang wilayah yang sesuai dengan RTRW	%	0.8%	23%	23%	23%	23%	23%	73%
6	Terwujudnya pelayanan publik dan Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai IKM	%	74	76	78	80	82	84	84
			Nilai AKIP	%	60	72	74	76	78	80	80

Tabel : 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat





STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan yang mantap,
2. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas.
3. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP, dan Menyusun rencana ketersediaan SPALD-T dan SPALD-S yang aman bagi masyarakat





2. Menyusun dokumen rencana tata ruang dan kegiatan TURBINLAKWAS
Tata Ruang
3. Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan
Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.





Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel No. 5.1** berikut :

Tabel : 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan yang mantap	Tersedianya jalan kabupaten yang mantap	Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan,	Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah.
Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas	Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat	Merencanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas	Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPALD-T dan SPALD-S yang aman bagi masyarakat
	Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari	Merencanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air minum perpipaan dan non perpipaan.	Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP
Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat	Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat	Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna	Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal



BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi, dengan demikian kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun program dan kegiatan utama yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.





4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Permukiman

- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

9. Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi





- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih rincinya Rencana program prioritas, Indikator Kinerja dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada ***tabel-6.1 terlampir.***



TABEL 6.1 MATRIK KEGIATAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa n (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029				
										(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1-		-2-		XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP Dinas PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	%	78,16	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-
			X	XX	01								79	27.345.696.074	80	37.724.071.760	81	30.185.336.913	82	19.291.645.780	83	28.429.898.266	68,50 (B)	137.386.952.718	SEKRETAR IAT
			X	XX	01	02:01		Perencanaan, Penganggaran, dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyelesaian dokumen Perencanaan, Penganggaran, dam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan	12	12	688.000.000	12	688.000.000	12	687.000.000	12	565.000.000	12	595.000.000	60	3.223.000.000	
			X	XX	01	02:01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000	40	1.000.000.000	
			X	XX	01	02:01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5 dokumen	200.000.000	5 dokumen	200.000.000	5 dokumen	200.000.000	5 dokumen	160.000.000	5 dokumen	180.000.000	25 Dokumen	940.000.000	
			X	XX	01	02:01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	148.000.000	12 Laporan	148.000.000	12 Laporan	145.000.000	12 Laporan	105.000.000	12 Laporan	115.000.000	60 Laporan	661.000.000	
			X	XX	01	02:01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	140.000.000	5 Laporan	140.000.000	5 Laporan	142.000.000	5 Laporan	100.000.000	5 Laporan	100.000.000	25 Laporan	622.000.000	
			X	XX	01	02:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Waktu penyelesaian Administrasi keuangan perangkat daerah			12 bulan	5.954.696.074	12 bulan	6.402.571.760	12 bulan	6.589.641.913	12 bulan	6.788.479.030	12 bulan	6.993.334.458	12 bulan	27.139.027.161	
			X	XX	01	02:02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	44	5.589.696.074	44	6.036.871.760	44	6.217.977.913	44	6.404.517.250	44	6.596.652.768	220	25.256.019.690	
			X	XX	01	02:02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12	35.000.000	12	35.700.000	12	36.414.000	12	37.142.280	12	37.885.126	60	182.141.406	
			X	XX	01	02:02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3 laporan	150.000.000	3 laporan	150.000.000	3 laporan	151.200.000	3 laporan	157.248.000	3 laporan	163.537.920	18 laporan	771.985.920	
			X	XX	01	02:02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			10 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	35.000.000	10 Dokumen	36.050.000	10 Dokumen	37.131.500	10 Dokumen	38.245.445	60 Dokumen	181.426.945	
			X	XX	01	02:02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			16 laporan	145.000.000	16 laporan	145.000.000	16 laporan	148.000.000	16 laporan	152.440.000	16 laporan	157.013.200	96 Laporan	747.453.200	
			X	XX	01	02:03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan BMD yang terkelola dan tepat waktu	Jumlah Laporan BMD yang terkelola dan tepat waktu			12 Laporan	325.200.000	12 Laporan	325.200.000	12 Laporan	331.700.000	12 Laporan	341.651.000	12 Laporan	351.900.530	60 Laporan	1.675.651.530	
			X	XX	01	02:03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	51.500.000	1 Dokumen	53.045.000	1 Dokumen	54.636.350	5 Dokumen	259.181.350	
			X	XX	01	02:03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			20 Dokumen	80.000.000	20 Dokumen	80.000.000	20 Dokumen	82.400.000	20 Dokumen	84.872.000	20 Dokumen	87.418.160	20 Dokumen	414.690.160	
			X	XX	01	02:03	05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	51.500.000	12 laporan	53.045.000	12 laporan	54.636.350	60 laporan	259.181.350	
			X	XX	01	02:03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	145.200.000	2 Laporan	145.200.000	2 Laporan	146.300.000	2 Laporan	150.689.000	2 Laporan	155.209.670	10 Laporan	742.598.670	
			X	XX	01	02:04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			1 Laporan	140.000.000,00	1 Laporan	140.000.000,00	1 Laporan	142.000.000,00	1 Laporan	146.260.000,00	1 Laporan	150.647.800,00	5 Laporan	718.907.800,00	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029				
													(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-		-2-								-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-		
			X	XX	01	02.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			1 Laporan	140.000.000,00	1 Laporan	140.000.000,00	1 Laporan	142.000.000	1 Laporan	146.260.000	1 Laporan	150.647.800	5 Laporan	718.907.800	
			X	XX	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12 bulan	486.000.000	12 bulan	486.000.000	12 bulan	541.200.000	12 bulan	557.436.000	12 bulan	574.159.080	12 bulan	2.644.795.080	
			X	XX	01	02.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.300.000	1 unit	10.609.000	1 unit	10.927.270	5 unit	51.836.270	
			X	XX	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			274 Stel	230.000.000,00	274 Stel	230.000.000,00	274 Stel	250.000.000	274 Stel	257.500.000	274 Stel	265.225.000	1370 stel	1.232.725.000	
			X	XX	01	02.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.900.000	12 Dokumen	31.827.000	12 Dokumen	32.781.810	60 Dokumen	155.508.810	
			X	XX	01	02.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 dokumen	146.000.000	1 dokumen	146.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	154.500.000	1 dokumen	159.135.000	5 dokumen	755.635.000	
			X	XX	01	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10 orang	70.000.000,00	10 orang	70.000.000,00	10 orang	100.000.000	10 orang	103.000.000	10 orang	106.090.000	50 orang	449.090.000	
			X	XX	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 bulan	1.158.000.000	12 bulan	1.158.000.000	12 bulan	1.177.650.000	12 bulan	1.222.849.500	12 bulan	1.259.534.985	12 bulan	5.976.034.485	
			X	XX	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100 Paket	86.000.000	100 Paket	86.000.000	100 Paket	86.950.000	100 Paket	89.558.500	100 Paket	92.245.255	500 Paket	440.753.755	
			X	XX	01	02.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			50 Paket	50.000.000	50 Paket	50.000.000	50 Paket	57.500.000	50 Paket	66.125.000	50 Paket	68.108.750	250 Paket	291.733.750	
			X	XX	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	110.000.000	12 Paket	110.000.000	12 Paket	113.300.000	12 Paket	116.699.000	12 Paket	120.199.970	60 Paket	570.198.970	
			X	XX	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.900.000	12 Paket	31.827.000	12 Paket	32.781.810	60 Paket	155.508.810	
			X	XX	01	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			5 Dokumen	27.000.000	5 Dokumen	27.000.000	5 Dokumen	29.600.000	5 Dokumen	30.488.000	5 Dokumen	31.402.640	25 Dokumen	145.490.640	
			X	XX	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	800.000.000	12 Laporan	824.000.000	12 Laporan	848.720.000	60 Laporan	4.072.720.000	
			X	XX	01	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	55.000.000	12 Dokumen	59.400.000	12 Dokumen	64.152.000	12 Dokumen	66.076.560	60 Dokumen	299.628.560	
			X	XX	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD			27 unit	8.830.000.000	27 unit	18.730.000.000	32 unit	18.185.900.000	21 unit	7.062.277.000	19 unit	15.800.000.000	118 unit	68.608.177.000	
			X	XX	01	02.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	2 unit	600.000.000	3 unit	1.500.000.000						5 unit	2.100.000.000		
			X	XX	01	02.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	4 Unit	2.200.000.000	4 Unit	2.200.000.000	10 Unit	2.640.000.000	2 Unit	1.000.000.000	2 unit	800.000.000	20 unit	8.840.000.000	
			X	XX	01	02.07	03	Pengadaan alat besar	Tersedianya Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit	8	1	5.500.000.000	3	14.500.000.000	3	15.000.000.000	1	5.500.000.000			8	40.500.000.000	
			X	XX	01	02.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	120	10 unit	30.000.000	10 unit	30.000.000	5 unit	30.900.000	5 unit	31.827.000	5 unit	7.500.000.000	30 unit	7.622.727.000	
			X	XX	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	83	20 unit	500.000.000	20 unit	500.000.000	10 unit	515.000.000	10 unit	530.450.000	10 unit	7.500.000.000	50 unit	9.545.450.000	
			X	XX	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12 Bulan	7.543.800.000	12 Bulan	7.543.800.000	12 Bulan	237.080.000	12 Bulan	244.870.000	12 Bulan	269.357.000	12 Bulan	15.838.907.000	
			X	XX	01	02.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	20	20 Laporan	8.800.000	20 Laporan	8.800.000	20 Laporan	9.680.000	20 Laporan	10.648.000	20 Laporan	11.712.800	100 Laporan	49.640.800	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029				
										(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1-		-2-									-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-	
			X	XX	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	laporan	12	12 Laporan	7.500.000.000	12 Laporan	7.500.000.000	12 Laporan	185.400.000	12 Laporan	190.962.000	12 Laporan	210.058.200	60 Laporan	15.586.420.200	
			X	XX	01	02.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	42.000.000	12 Laporan	43.260.000	12 Laporan	47.586.000	60 Laporan	202.846.000	
			X	XX	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang penunjang yang di pelihara	Jumlah barang penunjang yang di pelihara			69 Unit	2.220.000.000	69 Unit	2.250.500.000	69 Unit	2.293.165.000	69 Unit	2.362.823.250	69 Unit	2.435.964.413	412 Unit	11.562.452.663	
			X	XX	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5 unit	400.000.000	5 unit	400.000.000	5 unit	420.000.000	5 unit	441.000.000	5 unit	463.050.000	30 unit	2.124.050.000	
			X	XX	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	5 unit	310.000.000	5 unit	310.000.000	5 unit	325.500.000	5 unit	341.775.000	5 unit	358.863.750	30 unit	1.646.138.750	
			X	XX	01	02.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	8	5 unit	520.000.000	5 unit	546.000.000	5 unit	548.440.000	5 unit	575.862.000	5 unit	604.655.100	30 unit	2.794.957.100	
			X	XX	01	02.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya mebel yang di pelihara	Jumlah mebel yang di pelihara	unit	120	10 unit	10.000.000	10 unit	10.500.000	10 unit	11.025.000	10 unit	11.576.250	10 unit	12.155.063	50 unit	55.256.313	
			X	XX	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	83	57 unit	80.000.000	57 unit	84.000.000	57 unit	88.200.000	57 unit	92.610.000	57 unit	97.240.500	342 unit	442.050.500	
			X	XX	01	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	unit	1	2 unit	900.000.000	2 unit	900.000.000	2 unit	900.000.000	2 unit	900.000.000	2 unit	900.000.000	10 unit	4.500.000.000	
terjaminnya aliran air irigasi pertanian/perkebunan masyarakat	peningkatan kualitas sumber daya air di wilayah sungai dan irigasi	terlaksananya pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tersedianya bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	%	40	45%	102.725.000.000	50%	107.161.250.000	55%	111.764.312.500	60%	120.916.278.125	70%	126.962.092.031	70%	425.309.957.031	BIDANG SUMBER DAYA AIR
			1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Bangunan pengaman pantai/sungai yang terbangun di wilayah sungai kabupaten	%	55	60%	28.100.000.000	62%	29.505.000.000	65%	30.980.250.000	70%	32.529.262.500	80%	34.155.725.625	80%	11.051.262.500	
			1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	4	4	2.000.000.000	4	2.100.000.000	4	2.205.000.000	4	2.315.250.000	4	2.431.012.500	4	11.051.262.500	
			1	03	02	2.01	75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan	Jumlah lembaga pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/kota yang dibina dan diberdayakan	Lembaga	1	1	100.000.000	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	1	552.563.125	
							93	Normalisasi / Restorasi Sungai	Terlaksananya normalisasi / restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi / direstorasi	KM	110	51,91	20.000.000.000	51,91	21.000.000.000	51,91	22.050.000.000	51,91	23.152.500.000	51,91	24.310.125.000	259,55	110.512.625.000	
							100	Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air / Bendung pengendali banjir yang ditingkatkan	unit	4	2	6.000.000.000	2	6.300.000.000	2	6.615.000.000	2	6.945.750.000	2	7.293.037.500	12	33.153.787.500	
			1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase jaringan irigasi yang terbangun di wilayah daerah irigasi	%	55	60%	74.625.000.000	62%	77.656.250.000	65%	80.784.062.500	70%	88.387.015.625	80%	92.806.366.406	80%	414.258.694.531	
			1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya jaringan irigasi permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	m	7000	1500	5.000.000.000	1500	5.250.000.000	1500	5.512.500.000	1500	5.788.125.000	1500	6.077.531.250	14.500	27.628.156.250	
			1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya jaringan irigasi rawa	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	m	110000	25000	3.625.000.000	25000	3.806.250.000	25000	3.996.562.500	25000	4.196.390.625	25000	4.406.210.156	235.000	20.030.413.281	
			1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	m	7000 m	4000	5.000.000.000	4000	5.000.000.000	4000	5.500.000.000	4000	6.050.000.000	4000	6.352.500.000	7000	27.902.500.000	
			1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya jaringan irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi rawa yang Ditingkatkan	m	110000	127410	25.000.000.000	127410	26.250.000.000	127410	28.875.000.000	127410	31.762.500.000	127410	33.350.625.000	637050	145.238.125.000	
			1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya jaringan irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	m	30600 m	60000	27.000.000.000	60000	28.350.000.000	60000	27.000.000.000	60000	29.700.000.000	60000	31.185.000.000	30,6 km	143.235.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029		target	Rp	
										(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1-		-2-									-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-	
			1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	7000 m	1,4 km	1.500.000.000	1,4 km	1.500.000.000	1,4 km	1.650.000.000	1,4 km	1.815.000.000	1,4 km	1.905.750.000	7 km	8.370.750.000	
			1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	1666 km	15 km	7.500.000.000	15 km	7.500.000.000	15 km	8.250.000.000	15 km	9.075.000.000	15 km	9.528.750.000	75 km	41.853.750.000	
Tersedianya pelayanan sistem penyediaan air minum yang layak di kabupaten	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	meningkatkan jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih di wilayah kabupaten	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	terlayannya pengelolaan air minum di wilayah kabupaten	persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten	%	70,84	75%	26.220.000.000	75%	28.332.000.000	78%	31.165.200.000	85%	34.281.720.000	100%	37.709.892.000	100%	157.708.812.000	BIDANG CIPTA KARYA
			1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga terlayani Sistem pengelolaan air bersih	RT	52797	2050	26.220.000.000	2050	28.332.000.000	2050	31.165.200.000	2050	34.281.720.000	2050	37.709.892.000	63047	157.708.812.000	
			1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Terbangunnya Sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun	unit	85	10	3.500.000.000	10	3.850.000.000	10	4.235.000.000	10	4.658.500.000	10	5.124.350.000	135	21.367.850.000	
			1	03	03	2.01	0023	Peningkatan kapasitas kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	1	1	120.000.000	1	132.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	175.692.000	1	732.612.000	
			1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sisten Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sisten Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sisten Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	dokumen	20	10	2.000.000.000	10	2.200.000.000	10	2.420.000.000	10	2.662.000.000	10	2.928.200.000	70	12.210.200.000	
			1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Meningkatnya Sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/detik	110	20	3.500.000.000	20	3.850.000.000	20	4.235.000.000	20	4.658.500.000	20	5.124.350.000	210	21.367.850.000	
			1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	Terbangunnya Sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem penyediaan air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/detik	110	Liter/detik	600.000.000	Liter/detik	600.000.000	Liter/detik	660.000.000	Liter/detik	726.000.000	Liter/detik	798.600.000	Liter/detik	3.384.600.000	
			1	03	03	2.01	0029	Operasi dan pemeliharaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan di pelihara	Unit	1	1	12.000.000.000	1	13.200.000.000	1	14.520.000.000	1	15.972.000.000	1	17.569.200.000	1	73.261.200.000	
			1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang mendapat perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	SR	8000	1000	4.500.000.000	1000	4.500.000.000	1000	4.950.000.000	1000	5.445.000.000	1000	5.989.500.000	13000	25.384.500.000	
terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas sampah di wilayah kabupaten	manajemen pengelolaan sampah yang berkualitas	tersedianya infrastruktur pengolahan sampah yang berkualitas	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya Unit pengelolaan persampahan terhadap kebutuhan pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten	Persentase Unit pengelolaan persampahan terhadap kebutuhan pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten	%	7,14%	29%	4.100.000.000	29%	4.510.000.000	50%	4.961.000.000	71%	5.638.600.000	100%	6.202.460.000	100%	25.412.060.000	
			1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pengolahan persampahan dalam wilayah kabupaten	Jumlah unit pengolahan persampahan dalam wilayah kabupaten	Unit	1	3	4.100.000.000	3	4.510.000.000	3	4.961.000.000	3	5.638.600.000	3	6.202.460.000	11	25.412.060.000	
			1	03	04	2.01	0009	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	20	10	1.500.000.000	10	1.650.000.000	10	1.815.000.000	10	2.178.000.000	10	2.395.800.000	70	9.538.800.000	
			1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengelolaan persampahan yang disusun	Dokumen	5	3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	798.600.000	3	878.460.000	20	3.663.060.000	
			1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang disediakan	Unit	50	3	2.000.000.000	3	2.200.000.000	3	2.420.000.000	3	2.662.000.000	3	2.928.200.000	150	12.210.200.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029				
										(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1-		-2-									-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-	
meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengolahan air limbah yang layak	menyediakan pengelolaan sistem air limbah yang layak bagi masyarakat	tersedianya sarana dan prasarana pengolahan air limbah yang layak bagi masyarakat	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersedianya Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah	%	63,11%	66%	44.000.000.000	69%	10.850.000.000	72%	11.385.000.000	75%	11.973.500.000	78%	12.620.850.000	78%	90.829.350.000	
			1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memiliki pelayanan air limbah yang layak	RT	52797	500 RT	44.000.000.000	500 RT	10.850.000.000	500 RT	11.385.000.000	500 RT	11.973.500.000	500 RT	12.620.850.000	2500 SR	90.829.350.000	
			1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MA ³ /har	4000	800	2.500.000.000	800	2.750.000.000	800	3.025.000.000	800	3.327.500.000	800	3.660.250.000	8000	15.262.750.000	
			1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	MA ³ /har	1000	200	1.000.000.000	200	1.100.000.000	200	1.210.000.000	200	1.331.000.000	200	1.464.100.000	2000	6.105.100.000	
			1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan lumpur tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	500	20.000.000.000	500	1.500.000.000	500	1.650.000.000	500	1.815.000.000	500	1.996.500.000	2500	26.961.500.000	
			1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	MA ³ /har	0	2400	20.000.000.000	2400	5.000.000.000	2400	5.000.000.000	2400	5.000.000.000	2400	5.000.000.000	12000	40.000.000.000	
			1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	17	2.500.000.000	
berkurangnya wilayah yang menjadi rawan genangan	pengentasan wilayah perkotaan yang rawan genangan	berkurangnya luasan genangan di perkotaan	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase	Persentase Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan drainase dalam kabupaten		17,79%	42%	53.600.000.000	42%	58.960.000.000	44%	64.856.000.000	46%	71.341.600.000	50%	78.475.760.000	50%	327.233.360.000	
			1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Unit Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	M	54312	4500 m	53.600.000.000	4500 m	58.960.000.000	4500 m	64.856.000.000	4500 m	71.341.600.000	4500 m	78.475.760.000	22500 m	327.233.360.000	
			1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem Drainase perkotaan yang ditingkatkan	Sistem drainase perkotaan	3	2	15.000.000.000	2	16.500.000.000	2	18.150.000.000	2	19.965.000.000	2	21.961.500.000	3	91.576.500.000	
			1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem Drainase perkotaan yang direhabilitasi	Sistem drainase perkotaan	3	2	10.000.000.000	2	11.000.000.000	2	12.100.000.000	2	13.310.000.000	2	14.641.000.000	3	61.051.000.000	
			1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem Drainase perkotaan yang dibangun	Sistem drainase perkotaan	3	2	25.000.000.000	2	27.500.000.000	2	30.250.000.000	2	33.275.000.000	2	36.602.500.000	13	152.627.500.000	
			1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	2	3	600.000.000	3	660.000.000	3	726.000.000	3	798.600.000	3	878.460.000	17	3.663.060.000	
			1	03	06	2.01	0031	Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem Drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara	Sistem drainase perkotaan	3	2	3.000.000.000	2	3.300.000.000	2	3.630.000.000	2	3.993.000.000	2	4.392.300.000	17	18.315.300.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaa n (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029				
										(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1-		-2-									-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-	
tersedianya bangunan gedung yang laik fungsi	tersedianya pengelolaan dan pemamfaatan bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung yang sesuai tata bangunannya	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tersedianya bangunan Gedung yang di Tata Sesuai Perencanaan	Persentase bangunan Gedung yang di Tata Sesuai Perencanaan	%	20	30%	50.800.000.000	40%	66.880.000.000	50%	61.468.000.000	60%	67.614.800.000	70%	74.376.280.000	70%	310.139.080.000	
			1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya bangunan gedung yang di bangun dan di pelihara	Jumlah bangunan gedung yang di bangun dan di pelihara	Bangun an Gedung g	30	10 Unit	50.800.000.000	10 Unit	66.880.000.000	10 Unit	61.468.000.000	10 Unit	67.614.800.000	10 Unit	74.376.280.000	50 unit	310.139.080.000	
			1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang dipelihara, dirawat, dan diperiksa Berkala	Bangun an Gedung	30	10	10.000.000.000	10	11.000.000.000	10	12.100.000.000	10	13.310.000.000	10	14.641.000.000	30	61.051.000.000	
			1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Telaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokume n	35	30	50.000.000.000	30	55.000.000.000	30	60.500.000.000	30	66.550.000.000	30	73.205.000.000	185	305.255.000.000	
			1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokume n	325	500	800.000.000	500	880.000.000	500	968.000.000	500	1.064.800.000	500	1.171.280.000	2825	4.884.080.000	
kelancaran transportasi barang dan manusia di wilayah kabupaten	Meningkatnya kualitas jaringan jalan kabupaten	Persentase jalan dalam kondisi mantap	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tersedianya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	31,52%	34%	268.320.000.000	38%	288.952.000.000	42%	331.811.100.000	46%	351.686.805.000	50%	372.831.570.250	54%	1.613.601.475.250	BIDANG BINA MARGA
			1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya jalan kabupaten yang di tingkatkan dan di pelihara	panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan dan di pelihara	km	717,4	29	268.320.000.000	29	288.952.000.000	29	331.811.100.000	29	351.686.805.000	29	372.831.570.250	387,40	1.613.601.475.250	
			1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	Dokume n	125	25	3.500.000.000	25	3.850.000.000	25	4.235.000.000	25	4.658.500.000	25	5.124.350.000	250	21.367.850.000	
			1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang diganti	Jembat an		3	15.000.000.000	3	16.500.000.000	3	18.150.000.000	3	19.965.000.000	3	21.961.500.000	5	91.576.500.000	
			1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Terbangunnya jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	717,4	5	5.000.000.000	5	5.500.000.000	5	6.050.000.000	5	6.655.000.000	5	7.320.500.000	742,4	30.525.500.000	
			1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	717,4	29	127.020.000.000	25	139.722.000.000	25	146.708.100.000	25	154.043.505.000	25	161.745.680.250	717,4	729.239.285.250	
			1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan secara Berkala	Panjang Jalan yang dipelihara Secara Berkala	KM	717,4	15	28.000.000.000	15	28.000.000.000	15	29.400.000.000	15	30.870.000.000	15	32.413.500.000	75	148.683.500.000	
			1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan secara rutin	Jumlah Jembatan yang di Pelihara Rutin	Jembat an		10	1.000.000.000	10	3.500.000.000	10	5.000.000.000	10	5.250.000.000	10	5.512.500.000	50 unit	20.262.500.000	
			1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang di rehabilitasi	Jembat an		10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.500.000.000	10	11.025.000.000	50 unit	41.525.000.000	
			1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembat an		3	50.000.000.000	3	50.000.000.000	3	70.000.000.000	3	73.500.000.000	3	77.175.000.000	15	320.675.000.000	
			1	03	10	2.01	0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan secara Berkala	Jumlah Jembatan yang di pelihara secara berkala	Jembat an		10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	5.000.000.000	10	5.250.000.000	10	5.512.500.000	50 unit	21.762.500.000	
			1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya	Km	717,4	1 dokumen	800.000.000	1 dokumen	880.000.000	1 dokumen	968.000.000	1 dokumen	1.064.800.000	1 dokumen	1.118.040.000	5 dokumen	4.830.840.000	
			1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan secara rutin	Panjang Jalan yang dipelihara Secara Rutin	KM	717,4	15	30.000.000.000	15	33.000.000.000	15	36.300.000.000	15	39.930.000.000	15	43.923.000.000	75	183.153.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029				
													(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
-1-		-2-									-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-	
Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi	Tersedianya penyedia jasa konstruksi yang handal	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Tersedianya tenaga terampil konstruksi terlatih dan terdata dalam SIPJAKI	Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih dan terdata dalam SIPJAKI	%	4,00%	12,00%	626.900.000	12,00%	886.900.000	15,00%	660.000.000	18,00%	792.000.000	26,00%	864.000.000	26,00%	3.569.800.000	
			1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga terampil kontruksi terlatih terhadap jumlah kebutuhan tenaga terampil dalam kabupaten	rasio tenaga terampil kontruksi terlatih terhadap jumlah kebutuhan tenaga terampil dalam kabupaten	%	20,6	25,00%	466.900.000	30,00%	726.900.000	35,00%	480.000.000	40,00%	576.000.000	45,00%	604.800.000	45,00%	2.594.600.000	
			1	03	11	2.01	0010	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau analis	Jumlah tenaga kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau analis yang difasilitasi sertifikasi	Orang	225	150	260.000.000	150	260.000.000	150	290.000.000	150	348.000.000	150	365.400.000	750	1.523.400.000	
			1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis	Tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih	orang	450	200	466.900.000	200	466.900.000	200	480.000.000	200	576.000.000	200	604.800.000	1000	2.594.600.000	
			1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang andal	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		2	160.000.000	2	160.000.000	2	180.000.000	2	216.000.000	2	259.200.000	10	975.200.000	
			1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	5	5	130.000.000	5	130.000.000	5	150.000.000	5	180.000.000	5	216.000.000	25	806.000.000	
			1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi layanan informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya layanan informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan informasi Jasa Konstruksi yang dioperasikan	Layanan informasi		1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	36.000.000	1 dokumen	43.200.000	5 dokumen	169.200.000	
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan berlaku	tersedianya Peraturan / kebijakan penataan ruang kabupaten	Jumlah Peraturan / kebijakan tata ruang	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya Peraturan / kebijakan tata ruang	Persentase ketersediaan Peraturan/kebijakan tata ruang	%	0,08	23%	10.700.000.000	23%	12.320.000.000	23%	15.924.000.000	23%	19.108.800.000	23%	58.052.800.000	100%	79.733.360.000	
			1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	tersedianya dokumen RTRW, RRTR dan RDTR Kabupaten	Jumlah dokumen RTRW, RRTR dan RDTR Kabupaten	Dokumen	1	2	9.100.000.000	2	9.150.000.000	2	13.620.000.000	3	16.344.000.000	3	19.612.800.000	13	67.826.800.000	
			1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.800.000.000	1	1.800.000.000	1	2.160.000.000	1	2.592.000.000	1	3.110.400.000	5	11.462.400.000	
			1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya dokumen kebijakan pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen kebijakan pelaksanaan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.700.000.000	1	1.700.000.000	1	2.700.000.000	1	3.240.000.000	1	3.888.000.000	5	13.228.000.000	
			1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	1.700.000.000	2	1.700.000.000	2	2.700.000.000	2	3.240.000.000	2	3.888.000.000	10	13.228.000.000	
			1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah surat Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	3	1.700.000.000	3	1.700.000.000	3	2.700.000.000	3	3.240.000.000	3	3.888.000.000	15	13.228.000.000	
			1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/kota	Dokumen		2	1.700.000.000	2	1.700.000.000	3	2.700.000.000	3	3.240.000.000	3	3.888.000.000	13	13.228.000.000	
			1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	laporan		1	500.000.000	1	550.000.000	1	660.000.000	1	792.000.000	1	950.400.000	5	3.452.400.000	
			1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	rekomendasi ruang yang diberikan kepada masyarakat	Jumlah rekomendasi ruang yang diberikan	Dokumen	51	25	300.000.000	25	1.610.000.000	25	432.000.000	25	518.400.000	25	622.080.000	125	2.232.480.000	
			1	03	12	2.02	0004	Penyusunan peta dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ecw dan tersedianya data SHP peta dasar	Jumlah data SHP peta dasar	Peta	30	10	450.000.000	10	450.000.000	10	540.000.000	10	648.000.000	10	777.600.000	50	2.865.600.000	
			1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR kabupaten/kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RTRW kabupaten/kota	Dokumen	51	10	800.000.000	10	800.000.000	10	960.000.000	10	1.152.000.000	10	800.000.000	125	4.512.000.000	
			1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	kegiatan	1	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	1	518.400.000	1	622.080.000	5	2.232.480.000	
			1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya kesepakatan untuk pemanfaatan ruang dan investasi pembangunan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	1	1.440.000.000	1	1.728.000.000	1	2.073.600.000	5	7.441.600.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)		Penang-gung-jawab
										Kinerja Program			2025		2026		2027		2028		2029				
										(outcome) dan Kegiatan (output)			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
-1-		-2-									-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-18-	-19-	-18-	-19-	-20-	
			1	03	12	2.03	03	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan	Jumlah dokumen Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	1	1.440.000.000	1	1.728.000.000	1	2.073.600.000	5	7.441.600.000	
			1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan rekomendasi ruang	Jumlah rekomendasi ruang yang di awasi	Dokumen	1	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	1	518.400.000	1	622.080.000	5	2.232.480.000	
			1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	1	518.400.000	1	622.080.000	5	2.232.480.000	
			1	03	12	3.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan rekomendasi ruang	Jumlah rekomendasi ruang yang di awasi	Dokumen	1	1	1.309.161.000	1	1.400.000.000	1	1.450.000.000	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	5	7.209.161.000	
			1	03	12	3.03	0003	PelaksanaanPersetujuanKesesuaian KegiatanPemanfaatanRuang untuk Kegiatan Berusaha	Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai	Layanan	33	45	1.309.161.000	45	1.400.000.000	45	1.450.000.000	45	1.500.000.000	45	1.550.000.000	213	7.209.161.000	
			1	03	12	3.03	0004	PelaksanaanPersetujuanKesesuaian KegiatanPemanfaatanRuang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuanwaktuyangberlakuyaitu	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untukkegiatannonberusaha sesuai dengan	Layanan														
			1	03	12	3.05		Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
			1	03	12	3.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan	Dokumen														
			1	03	12	3.06		Pengawasan Penataan Ruang																	
			1	03	12	3.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAKdanPengawasanFungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan	Dokumen														
			1	03	12	3.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen														
			1	03	12	3.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Laporan														
														588.437.596.074		616.576.221.760		664.179.949.413		702.645.748.905		796.525.602.547		3.170.924.207.000	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Untuk melakukan pengukuran kinerja telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Indikator Input (masukkan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan
 - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Program yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
2. Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
3. Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
4. Persentase kesesuaian ruang.



5. persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten.

Untuk lebih rincinya indikator indikator diatas dapat dilihat pada Tabel-7.1 berikut ini :



Tabel : 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021)	Target Kinerja pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	33%	43%	45%	47%	49%	51%	53%	53%
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	63,11%	66%	69%	72%	75%	78%	81%	81%
3	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	70,84%	72%	75%	78%	81%	84%	87%	87%
4	Persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar senantiasa mampu mengikuti setiap perubahan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2025 – 2029. Oleh karena itu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan guna menjamin kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah.

Dengan melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini sangat diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis ini diharapkan bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, melainkan merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

